



# LEMHANNAS RI

## NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi V 20 Desember 2009

### DAFTAR ISI

1. Strategi Komprehensif Penanggulangan Terorisme .....	1
2. Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.....	2
3. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi.....	3
4. LABKURTANNAS.....	4
5. KORPRI Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik.....	5
6. Hasil Penelitian Deputi Pemanjangan Nilai-Nilai Kebangsaan .....	6
7. Penguatan Kebijakan Energi Guna Mendukung Perekonomian Nasional Dalam Rangka Ketahanan nasional .....	7
8. Penataran Istri/Suami Peserta PPRA XLIII Tahun 2009...	8
9. Kunjungan Commander U.S Pacific Fleet, Admiral Patrick Wals.....	9
10. Kegiatan Dewan Pengarah Lemhannas RI.....	10
11. Idul Qurban 1430 H.....	11
12. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.....	12



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH berbincang-bincang dengan Presiden RI tentang Penguatan Kebijakan Energi Nasional, sesaat setelah acara Pembekalan kepada para Alumni PPSA XVI dan Peserta PPRA XLIII Lemhannas RI Tahun 2009 di Istana Negara. (Berita selanjutnya di halaman..... 7)

## STRATEGI KOMPREHENSIF PENANGGULANGAN TERORISME



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. memimpin Round Table Discussion tentang "Strategi Komprehensif Penanggulangan Terorisme" tanggal 5 November 2009 di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung Tri Gatra Lt. 1. Lemhannas RI

**T**errorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Menghadapi persoalan tersebut Lemhannas RI sangat *Concern* terhadap perkembangan lingkungan strategik yang terkait dengan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, termasuk masalah terorisme. Langkah awal pada bulan Maret 2009 Lemhannas RI telah melakukan kajian yang terkait dengan terorisme melalui *Round Table Discussion* tentang **Peningkatan Kewaspadaan Nasional Guna Mengantisipasi Tindak Terorisme Dalam Rangka Stabilitas Politik dan hasilnya telah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia**. Rekomendasi tersebut intinya adalah; **pertama**, tindakan Kejahatan Terorisme perlu diwaspadai, sebab tindakan Kejahatan Terorisme dapat terjadi kapan dan dimanapun, karena tindakan Kejahatan Terorisme tidak mengenal ruang dan waktu; **kedua**, perlu meningkatkan status *Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)* menjadi badan koordinasi pemberantasan.

Tindak lanjut kegiatan *Round Table Discussion* bulan Maret 2009 tersebut dievaluasi kembali melalui *Round Table Discussion* pada tanggal 5 November 2009 yang membahas tentang **Strategi Komprehensif Penanggulangan Terorisme** sesuai rekomendasi keputusan *National Summit*, dan hasilnya tetap mendukung dibentuk badan permanen penanggulangan terorisme. Mengingat terorisme sebagai bahaya laten yang merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara dan juga merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Oleh sebab itu Kewaspadaan Nasional khususnya mengantisipasi tindakan Kejahatan Terorisme harus tetap ditingkatkan seiring dengan perkembangan lingkungan strategik. Beberapa Strategi Komprehensif untuk Penanganan Terorisme yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Tidak menimbulkan konflik antar instansi pemerintahan.
2. Meningkatkan *sinergitas* yang terkoordinasi seluruh kekuatan yang ada (TNI, Polri, BIN dan lain-lain).
3. Memperhatikan basis *kultur, geopolitik* dan *geostrategi*.
4. Meningkatkan kerjasama Internasional.

## KOORDINASI LINTAS SEKTORAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KETAHANAN ENERGI NASIONAL



Wakil Gubernur Lemhannas RI menyematkan tanda peserta Olah Sismennas kepada perwakilan PPRA XLIII tanggal 10 Nopember 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Marsekal Madya TNI DR. Rio Mendung Thalieb pada acara pembukaan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) PPRA XLIII TA. 2009, 10 November 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI dengan tema "Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional", antara lain menyatakan bahwa kegiatan Olah Sismennas merupakan salah satu metode belajar mengajar dalam Program Pendidikan di Lemhannas RI, dengan mengaplikasikannya ke dalam bentuk simulasi kerja aparatur pemerintahan.

Sesuai dengan tema kali ini

dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa energi memiliki peran bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan Ketahanan Nasional. Bagi Negara Indonesia hal ini sangat penting, selain sebagai kemampuan merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) juga sebagai kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi (internal), sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dari *Supply Side Policy* menjadi *Demand Side Policy*.

Karenanya diperlukan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pada sisi penawaran tetapi juga dari sisi permintaan. Pengelolaan dari kedua sisi secara berkesinambungan dan komplementer yang diharapkan dapat

menciptakan ketahanan energi nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kelangkaan energi yang terjadi saat ini merupakan ancaman yang serius bagi NKRI di masa yang akan datang sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional secara berkelanjutan, yang pada akhirnya nanti mengancam Ketahanan Nasional.

Melalui Olah Sismennas ini diharapkan peserta dapat menghayati akan pentingnya memantapkan koordinasi lintas sektoral, untuk menciptakan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta mampu melahirkan ide-ide yang cemerlang dalam rangka menciptakan ketahanan energi nasional.

# SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI

**B**erempat di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, tanggal 3 November 2009 telah dilaksanakan acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lemhannas RI.

Dalam amanatnya Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH. menyatakan bahwa dalam manajemen organisasi pemerintahan yang modern, Sistem Pengendalian Intern merupakan hal yang sangat penting, harus dibangun secara terus menerus dan dilaksanakan pada setiap unit kerja secara keseluruhan di setiap instansi pemerintahan termasuk di Lemhannas RI.

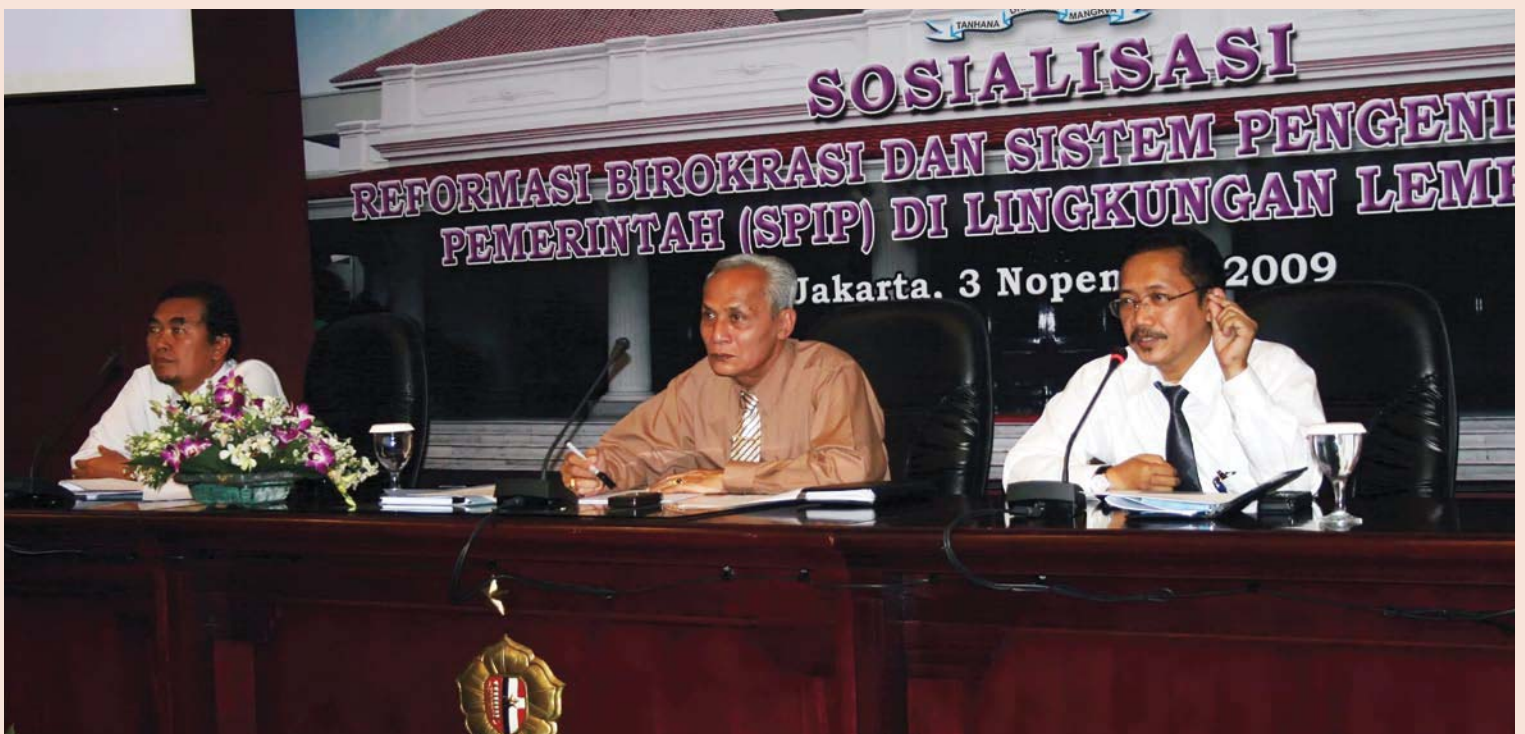
Sistem Pengendalian Intern pemerintah yang baik, akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara baik pula, sehingga diharapkan penyelenggaraan

pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* dan akan terhindar dari tuntutan hukum, baik administrasi, perdata maupun pidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Kementerian atau Lembaga Wajib Melakukan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lembaganya.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut berbagai aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Hal tersebut bertujuan untuk membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur Negara yang memiliki *integritas* tinggi. Adanya berbagai

permasalahan yang dapat mengganggu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus ditata ulang untuk diadakan perbaikan, karena pada dasarnya Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, dan merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur negara, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban amanat sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Melalui forum ini diharapkan agar peserta sosialisasi Lemhannas RI dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas dan selanjutnya hasil sosialisasi tersebut dapat dirumuskan secara baik dan lebih konkrit, guna perbaikan dan peningkatan *akuntabilitas* kinerja Lemhannas RI.



Para narasumber didampingi Moderator pada acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Lemhannas RI

# LABKURTANNAS

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, antara lain menggunakan beberapa pendekatan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang bersifat *historical* melalui pendekatan *geopolitik* dan *geostrategi* dalam konteks Ketahanan Nasional yang menganalisis permasalahan-permasalahan nasional. Berbagai permasalahan nasional yang muncul tersebut beberapa diantaranya merupakan dampak perkembangan lingkungan strategis, baik Regional maupun Internasional. Hal tersebut tentunya erat kaitannya dengan tinggi rendahnya Ketahanan Nasional suatu Negara.

Lemhannas RI dalam era informasi ini, merasa berkewajiban untuk meningkatkan manfaat sistem informasi dengan membangun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang nantinya berfungsi untuk memantau dan menganalisis tingkat/ indeks Ketahanan Nasional, dan Ketahanan Nasional di Daerah di 33 Provinsi melalui pendekatan *geopolitik* dan *geostrategik* (dimensi statis dan dinamis). Terkait dengan Pengukuran Ketahanan Nasional tersebut, telah dibentuk Tim Sosialisasi Pengukuran Ketahanan Nasional yang pada minggu ke II dan III November 2009



*Prof. Dr. Miyasto, SU, memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Permodelan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional, yang diikuti oleh Tim Konsultan dan Tim Counter-part Lemhannas RI, di Ruang Rapat Labkurtannas Lemhannas RI*

telah melaksanakan kunjungan kepada Gubernur dan pejabat pemerintah di provinsi seluruh Indonesia.

Dalam Sosialisasi tersebut, Tim menjelaskan antara lain tentang peningkatan manfaat Pengukuran Ketahanan Nasional yang semula hanya untuk *Academic Exercise* dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, ke depan menjadi instrumen yang dapat digunakan sebagai *Early Warning System* dan *Policy Advice* baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang asas-asas Pengukuran Ketahanan Nasional yang meliputi asas pendekatan sistem, keterpaduan / *incorporated*, daya saing / *competitiveness*, Lintas sektoral dan lintas disiplin, *Profesionalisme*, Manfaat, serta Teknologi tinggi. Tim juga menjelaskan beberapa hal, seperti: Proses dalam Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Konsep Labkurtannas, Tabel Input (Matriks Data) dan Beberapa aspek *variabel* dan indikator terkait Pengukuran Ketahanan Nasional, antara lain: Contoh hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan Data *Hipotetik* dan Contoh Simulasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan Data *Hipotetik*.



*Server, Perangkat Keras (hardware) yang dipergunakan dalam LABKURTANNAS*

# KORPRI

## MENDUKUNG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK



Anggota PNS Lemhannas RI mendengarkan Sambutan Presiden RI yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI pada upacara HUT Ke-38 KORPRI di Lapangan Tengah

Sambutan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang dibacakan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. pada upacara peringatan hari jadi KORPRI ke-38 tanggal 30 November 2009 di Lemhannas RI, menyatakan bahwa KORPRI sejak didirikan tanggal 29 November 1971, selalu menunjukkan peran dan tanggungjawab sesuai dengan kondisi saat ini untuk mengarahkan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.

Pada sambutan tersebut Presiden RI mengatakan bahwa perjalanan bangsa mengantarkan KORPRI sebagai organisasi yang *professional* dan mandiri, yang kedudukannya dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, untuk selalu bergerak bersama komponen bangsa lainnya agar secara konsisten memperjuangkan cita-cita bangsa. Walaupun tantangan yang kita hadapi untuk mencapai cita-cita bangsa itu semakin berat dan kompleks dibanding tantangan dimasa lalu.

Oleh karena itu, segenap anggota KORPRI sebagai Aparatur Negara harus tetap meningkatkan ketiga perannya sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah. Mari kita bangun ketiga peran itu sebagai ibadah, pekerjaan sebagai Aparatur Negara yang tidak ringan, akan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilakukan sebagai ibadah yang tulus dan ikhlas, disertai semangat dan kecintaan terhadap pekerjaan dan profesi.

Upaya pengembangan kesejahteraan Aparatur Negara masih sangat dibatasi oleh kemampuan anggaran Negara, namun kita bersyukur semua itu tidak mengurangi disiplin, *loyalitas*, dan *profesionalisme* para anggota KORPRI. Meskipun anggaran kita masih terbatas, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran yang berkaitan dengan

peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Upaya ini penting, untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, agar dapat meningkat kualitas kinerja birokrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, termasuk meningkatkan moril para PNS untuk mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh Negara.

Selaku Penasehat Nasional KORPRI, Presiden RI menyampaikan beberapa pesan dan ajakan sebagai berikut:

- Pertama** : Melanjutkan reformasi, untuk terus mengembangkan demokrasi, menegakkan hukum, membangun sistem yang bersih.
- Kedua** : Terus cukupkan kebutuhan pokok rakyat dan perekonomian daerah, di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Ketiga** : Tunjukkan bahwa para anggota KORPRI di seluruh Indonesia tanggap dalam mendengarkan kritik-kritik masyarakat agar kita lebih maju.
- Keempat** : Membangun mental melayani, bukan mental dilayani. Karena pelayanan publik yang di harapkan harus mudah dan tidak berbelit-belit.
- Kelima** : Menetapkan pembangunan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*, dan reformasi birokrasi sebagai prioritas.
- Keenam** : Harus lebih melihat ke depan yaitu melakukan usaha yang tak kalah pentingnya untuk pencegahan korupsi yang perlu dilaksanakan secara sangat serius.
- Ketujuh** : Bersama-sama jalankan tugas mengabdikan kepada Bangsa dan Negara dengan prinsip yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

## HASIL PENELITIAN

# DEPUTI PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Pada acara *Round Table Discussion* hasil Penelitian Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan tanggal 25 November 2009, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini adalah bagaimana memahami secara tepat nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam konsensus nasional yang terdiri dari 4 (empat) pilar utama, meliputi: Pancasila, UUD'45, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat meningkatkan rasa bangga berada dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Dengan pemahaman yang tepat terhadap 4 (empat) pilar Konsensus Nasional sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus hal itu sebagai simpul kebangsaan yang mencerminkan kebersamaan. Di era *globalisasi* yang penuh dengan dinamika dan *turbulensi* sosial sangat dibutuhkan, karena kesadaran atas kebersamaan yang kuat merupakan kapital sosial. Tanpa hal tersebut peranan Negara akan menjadi sangat lemah dan tidak efektif, terutama dihadapkan oleh arus *globalisasi* dan *regionalisasi* yang cenderung semakin kuat. Lunturnya *interaktif* yang

diwarnai dengan *social trust* akan berdampak menurunnya produktivitas bangsa.

Kebersamaan sebagai satu bangsa sangat strategis tidak hanya larut pada pendekatan rutin, praktis dan pragmatis semata, namun akan memantapkan karakter bangsa dan memperkuat integrasi bangsa serta kehendak politik untuk selalu meningkatkan rasa kebangsaan, karena hal tersebut merupakan kekuatan nasional yang akan sangat diperhitungkan oleh bangsa dan Negara lain. Bangsa selalu menjunjung sejarah, *geopolitik*, peradaban dan lain-lain.

Pemahaman yang tepat terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai jati diri bangsa merupakan salah satu upaya untuk menghentikan kerawanan dan berkembangnya konflik dalam masyarakat sekaligus menjadi filter terhadap *globalisasi*. Oleh karena itu *reaktualisasi* dan *revitalisasi* nilai-nilai kebangsaan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat. Implementasinya adalah munculnya ide-ide segar yang dikembangkan dalam *konteks cultural* dan nilai-nilai kebangsaan yang ditopang oleh pilar-pilar dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah.



Tanggapan dari Para Direktur jajaran DETAPLAI tentang Hasil Penelitian Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, setelah di buka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH.

## PENGUATAN KEBIJAKAN ENERGI GUNA Mendukung PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Pernyataan Gubernur Lemhannas RI pada pembukaan seminar PPRA XLIII tanggal 2 Desember 2009 bahwa seminar merupakan ajang tukar pikiran yang strategis bagi peserta program pendidikan reguler di lembaga ini, untuk menuangkan berbagai kemampuan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan agar dapat dijadikan bahan dan pisau analisis yang *komprehensif* dan *integral*, guna merumuskan sebuah konsepsi tentang skenario, prinsip dan strategi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara. Rumusan konsepsi strategis tersebut dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggaraan negara yang sedang berlangsung saat ini maupun kedepan. Seminar ini sangat *relevan* dengan kondisi *factual* dan *actual* yang sedang dihadapi Bangsa dan Negara kita. Hal ini tercermin dari program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan program pemerintah 5 Tahun mendatang yang antara lain sangat memperhatikan masalah *revitalisasi energi*.

Energi merupakan *Sub Determinan* Ketahanan Nasional yang sangat strategis dan *Critical* serta merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, kehidupan suatu Bangsa dan kelangsungan hidup suatu Negara termasuk Indonesia.

Mengalir dari logika diatas, diperoleh hipotesa bahwa tidak ada aktivitas masyarakat modern termasuk aktivitas masyarakat Indonesia yang lepas dari peran penting dan strategis dari energi. Bahkan setiap aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat senantiasa membutuhkan energi, karenanya penguatan kebijakan energi akan sangat berpengaruh dan menentukan perekonomian nasional yang bermuara pada

Ketahanan Nasional. Dalam hal ini analisis yang didasarkan atas prinsip *Anticipatory Resilience* yang memprediksi pelbagai kemungkinan yang akan terjadi 25-50 tahun ke depan sangat strategis, baik nasional maupun *global* tantangan yang terlihat nyata di masa depan *World's Energy Challenge* antara lain adalah permintaan energi yang terus meningkat baik di negara maju maupun negara berkembang.

Agar kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara terjamin, maka kedepan akses untuk memperoleh energi yang murah dan aman menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka menfungsikan perekonomian nasional yang mengarah kepada perekonomian modern. Ketahanan Energi merupakan pilar penting Ketahanan Ekonomi, sesuai Undang-undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 Sadar akan perkembangan lingkungan strategis *global*, *regional* dan nasional, pemerintah telah mengubah paradigma kebijakan energinya dari *Supply Side Policy* (SSP) menjadi *Demand Side Policy* (DSP).

Melalui seminar ini diharapkan mampu merumuskan konsepsi tentang skenario, prinsip dan strategi Indonesia di bidang energi, yang di satu pihak memfokuskan diri pada peningkatan pasokan energi dan di lain pihak dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kemanusiaan dan lingkungan hidup, sebagai sumbangan pikiran bagi penyelenggaraan negara khususnya dalam penguatan kebijakan energi guna mendukung perekonomian nasional dalam rangka Ketahanan Nasional. Pada akhir sambutan Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Lemhannas RI selalu bersemboyan ***The Flame Of Indonesian Resistance Must Not And Shall Not Die.***



Moderator memperkenalkan narasumber pada seminar Penguatan Kebijakan Energi guna Mendukung Perekonomian Nasional Dalam rangka Ketahanan Nasional (kiri). Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. saat membuka seminar (kanan atas), Photo bersama Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. dengan Ketua Seminar dan para narasumber (kanan bawah).

# PENATARAN ISTRI/SUAMI PESERTA PPRA XLIII TAHUN 2009

Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI, salah satu program kegiatan kurikulum pendidikan PPRA XLIII Tahun 2009 adalah penyelenggaraan penataran istri/suami peserta selama 6 (enam) hari mulai tanggal 1 s/d 8 Desember 2009. Tujuan penataran adalah untuk meningkatkan wawasan para isteri/suami sejalan dengan makin berkembangnya wawasan para peserta PPRA XLIII.

Selain itu untuk memantapkan ikatan kekeluargaan antara sesama isteri/suami peserta dengan personil organik Lemhannas RI, memupuk keakraban dan saling mengenal, yang dilandasi wahana terciptanya iklim persahabatan yang *kondusif* dan *komunikatif* di masa mendatang terlebih lagi pada PPRA XLIII Tahun 2009 ini terdapat beberapa peserta dari Negara sahabat.

Keberhasilan para peserta PPRA XLIII Lemhannas RI dalam meniti karir dan mengemban tugas Negara dari waktu ke waktu nantinya, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran isteri/suami selaku pendamping. Oleh sebab itu para peserta sudah sepatutnya melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika, dengan kata lain penyesuaian IQ, EQ dan SQ.

Mencermati situasi yang berkembang dewasa ini dan *fenomena* kedepan, maka beberapa pendapat sebagai acuan yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI difahami, antara lain:

1. **Vaclaf Havel**, mantan Presiden Republik Checch, disaat masih dikuasai komunis **tanpa memperhatikan sensor**, menyerukan pada rakyatnya pada tanggal 1 Januari 1990 bahwa *We live in a contaminated moral environment*.
2. **Mother Theresa** seorang NUN yang berasal dari Albania yang hidup diantara



*Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH, menyematkan tanda peserta Penataran Istri/Suami kepada perwakilan Peserta Penataran pada tanggal 1 Desember 2009 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI*

orang-orang papa di India sampai wafatnya yang memperingatkan umat manusia pada saat menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tanggal 11 Desember 1979 bahwa *Love begins at home*. Hal ini patut dihayati karena kecenderungan yang demikian seyogyanya diwaspadai dan disikapi secara bijak, dengan tetap mengacu dan mempedomani 4 (empat) pilar konsensus kebangsaan kita meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, dengan harapan para alumni memiliki semboyan sebagaimana diucapkan oleh :

3. **John F. Kennedy** dalam *Innaugural Address* pada tanggal 20 Januari 1961, yang menyatakan *Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country*.

4. **Winston Churchill** didepan *House of Common*, London, pada tanggal 13 Mei 1940, yang menyatakan *I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat*.

Secara substansi hakekat penataran ini menyiapkan para isteri/suami agar lebih mantap perannya dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sosial lainnya, selain perannya dalam keluarga. Sebelum mengakhiri sambutan Gubernur Lemhannas RI berharap dan menekankan agar penataran yang sangat singkat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan partisipasi ibu-ibu dalam mendampingi suami/isteri nantinya dengan mengutip apa yang dikatakan oleh **Indira Gandhi** mantan Presiden India Putri Nehru pada tanggal 23 November 1974 menyatakan bahwa *Women's education is almost more important than the education of boys and men*.



## Kunjungan Commander U.S. Pacific Fleet, Admiral Patrick Walsh



*Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. Sedang mendengarkan penjelasan dari salah satu staff U.S. Pacific Fleet*

**G**ubernur Lemhannas RI Prof. DR Muladi, SH menerima kunjungan Commander US. Pacific Fleet Admiral Patrick Walsh di ruang Dewan Pengarah Lemhannas RI Pada tanggal 4 Desember 2009.

Dalam Courtesy Call tersebut Gubernur Lemhannas RI yang didampingi oleh Wakil Gubernur, Marsdya TNI DR. Rio



*Tukar menukar cinderamata antara Gubernur Lemhannas RI dengan US Pacific Fleet Commander Admiral Patrick Walsh se usai memberikan ceramah kepada peserta PPRA XLIII Lemhannas RI pada tanggal 4 Desember 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI*

Mendung Thalieb, Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Marsda TNI Surya Darma, SIP sedang Admiral Patrick Walsh didampingi oleh 5 (lima) orang Staf U.S. Pacific Fleet berlangsung baik dan lancar. Acara dilanjutkan dengan ceramah di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI yang diikuti oleh peserta PPRA XLIII dan dihadiri oleh pejabat struktural eselon I dan II, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI dengan materi ceramah "Future Relations and Mil Engagement Between U.S Pacific Fleet Assets and TNI". Ceramah dilanjutkan dengan Tanya jawab dan diakhiri dengan tukar menukar cenderamata.

## KEGIATAN DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI



*Diskusi Internal Dewan Pengarah Lemhannas RI tentang "Permasalahan dan Solusi IPTEK Nasional dalam mensukseskan semester I 2010 dibawah SBY-Boediono Administration" Pada Tanggal 7 Desember 2009 di Gedung Asta Gatra Lt. 3*



*Dewan Pengarah Lemhannas RI sedang membahas Program Kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 6 Oktober 2009 di Ruang Rapat Dewan Pengarah*



*Suasana Diskusi Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI dengan Tema "Ketahanan Nasional dan Kewaspadaan Nasional" di Gedung Asta Gatra Lemhannas RI, pada hari senin, tanggal 26 Oktober 2009*

# Idul Qurban 1430 H

Pada tanggal 30 November 2009, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. didampingi Wakil Gubernur, dan Sekretaris Utama, melaksanakan Acara Penjualan Hewan Qurban dalam rangka menyambut Idul Adha 1430 H dengan tema:

**Jadikanlah Idul Qurban 1430 H untuk Meningkatkan Solidaritas Sosial dan Kepedulian Umat guna Mewujudkan Ketaqwaan kepada Allah SWT.**

Acara Qurban yang diselenggarakan di halaman Masjid Sudirman Lemhannas RI tersebut dihadiri para Deputi, Tenaga Profesional, Pejabat Struktural, dan segenap warga Lemhannas RI, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan Lemhannas RI.

Pada Idul Qurban 1430 H tahun 2009 ini Lemhannas RI berqurban sebanyak 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Daging Hewan Qurban tersebut sebagian disalurkan kepada personel Lemhannas RI yang berhak menerimanya dan sebagian lagi kepada warga masyarakat sekitar Lemhannas RI. Hewan Qurban tersebut merupakan partisipasi amal ibadah dari berbagai pihak yang dihimpun oleh panitia Idul Qurban 1430 H Lemhannas RI.

Pada acara tersebut dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Ibadah Qurban mengandung arti sangat luas, khususnya di bidang spiritual dan sosial, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail memberikan contoh atas kepatuhan dan kepasrahannya dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Secara sosial kepatuhan tersebut mengandung makna agar setiap

manusia mau dan patuh, serta ikhlas, tanpa pamrih melakukan pengorbanan untuk membantu mereka yang membutuhkan, yaitu pengurbanan dilakukan semata-mata hanya mengharap ridho Allah SWT. Hewan yang dikurbankan hanyalah sebagai *representasi*, yang mengandung makna untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Hal tersebut merupakan wujud kecintaan kepada Allah SWT yang *diaktualisasikan* dalam kecintaan terhadap sesama umat manusia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

***Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam saat***

***Idul Adha, selain menyembelih hewan qurban.***

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI menghimbau, agar dalam memaknai pengurbanan Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut, dapat lebih meningkatkan Iman dan Taqwa kita kepada Allah SWT, yang tercermin pada semakin meningkatnya hubungan kepada Allah, *Hablumminallah* dan sesama manusia, *Hablumminannas*.

Dalam akhir sambutannya, Gubernur Lemhannas RI berharap, semoga pelaksanaan amal ibadah qurban dijadikan *motivasi* untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing kepada Negara dan bangsa.



Gubernur Lemhannas RI menyerahkan satu ekor sapi kepada Ketua Panitia Qurban Lemhannas RI, Kolonel Laut (T) Ir. Supriadi

## Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2009



*Para peserta CPNS Lemhannas RI sebanyak 301 orang sedang mengikuti Tes Pengetahuan Umum di GOR Planet Senen pada tanggal 11 Nopember 2009*

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: Skep/62/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Instansi Pusat di Lingkungan Lemhannas RI TA. 2009 dan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor: Sprin/320/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Instansi Pusat di Lingkungan Lemhannas RI TA. 2009, Lemhannas RI telah membuka kesempatan bagi masyarakat dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Seluruh rangkaian pendaftaran dengan kelengkapan persyaratan diselenggarakan tanggal 26 Oktober sampai dengan 3 Nopember 2009, selanjutnya dilakukan 4 tahapan seleksi sebagai berikut:

**Tahap pertama**, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Nopember 2009 adalah seleksi administrasi bagi 765 orang pelamar yang memenuhi persyaratan telah diumumkan melalui website Lemhannas RI. Pada tanggal 7 sampai dengan 8 Nopember 2009 Pelamar yang telah memenuhi persyaratan mengambil nomor tes dengan membawa

berkas pelamar yang diperlukan. Dari sejumlah pelamar yang memenuhi persyaratan, yang hadir sejumlah 301 orang.

**Tahap kedua**, pada tanggal 10 sampai dengan 11 Nopember 2009 dilaksanakan tes Pengetahuan Umum (Tes Kompetensi Dasar / TKD dan Tes Kompetensi Bidang / TKB) dan berhasil lulus sejumlah 71 orang.

**Tahap ketiga**, pada tanggal 17 sampai dengan 18 Nopember 2009 dilaksanakan tes kesehatan di Poliklinik Lemhannas RI yang hasilnya lulus sejumlah 65 orang.

**Tahap keempat**, pada tanggal 23 sampai dengan 24 Nopember 2009 dilaksanakan tes akhir yaitu wawancara. Hasil akhir seleksi kelulusan pelamar yang ditentukan oleh Pantukhir dengan kualifikasi pendidikan sesuai alokasi kebutuhan, dan berhasil lulus sebanyak 28 orang.

**Pengarah :** DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si. **Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo,  
**Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc **Penyunting/Editor :** Djoko Saksono,  
Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

**Redaktur Pelaksana :** Linda Purnamasari. , Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

**Desain Grafis & Fotografer :** Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto, Hendrik Garang,

**Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

**Alamat Redaksi :** Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)  
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926